

Dukungan Vanuatu Terhadap Kemerdekaan Papua: Tinjauan Konstruktivisme Holistik

Muhammad Riza Hanafi¹, Isnin Nabila Annahda²

^{1,2} Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Brawijaya, Indonesia

SUBMISSION TRACK

Received : 19 March 2022
Final Revision : 03 May 2022
Available Online : 30 May 2022

KEYWORD

Holistic Constructivism, Identity, Melanesian Way, Papua.

KATA KUNCI

Konstruktivisme Holistik. Identitas, Melanesian Way, Papua, Vanuatu

CORRESPONDENCE

Phone :
E-mail :

ABSTRACT

The use of Gili Trawangan, a small island located northwest of Lombok, has changed from a place where fishers from Sulawesi anchored their boats to become a tourist spot visited by tourists from various regions and countries, particularly for scuba diving. This article shows the dynamics of geopolitics on the island through a six-month field study on Gili Trawangan and direct interviews with early settlers and community leaders. The primary data was analyzed using the geopolitical concepts of borders and identities. From a geopolitical point of view, the fishermen, who were the island's first settlers, now lose control of the territory and find it difficult to access resources, culture, and the economy. Investors from outside the island and abroad have controlled this island geopolitically and created their own geopolitical identity. They use Western identities and cultures to dominate geopolitics in the strategic area of the island as the market wants.

ABSTRAK

Vanuatu adalah salah satu dari beberapa negara Melanesia yang secara konsisten mendukung kemerdekaan Papua. Posisi Vanuatu ini merupakan bentuk dari solidaritas Melanesia menentang kolonialisme yang berbasiskan pada nilai regional yang dikenal sebagai Melanesian Way. Diperkenalkan oleh Bernard Narokobi, filsuf dan penulis puisi asal Papua Nugini, Melanesian Way dibawa oleh beberapa mahasiswa Vanuatu yang belajar di Universitas Papua Nugini. Ideologi nasionalis ini kemudian menjadi semangat anti-kolonialisme di Vanuatu. Ideologi inilah yang akan didiskusikan dalam tulisan ini sebagai identitas yang mengkonstruksi kepentingan Vanuatu dalam mendukung kemerdekaan Papua. Kajian ini menggunakan pendekatan konstruktivisme holistik untuk mengkaji bagaimana identitas Vanuatu mampu mempengaruhi posisinya mendukung kemerdekaan Papua dari 2010 – 2019. Dengan melihat pada dua variable pendekatan konstruktivisme holistik, level domestik dan sistemik, diketahui bahwa level domestik memiliki peran yang lebih besar dalam membentuk dukungan Vanuatu terhadap kemerdekaan Papua. Ini artinya identitas dan kepentingan Vanuatu terbentuk dari dalam, dimana identitas bersama memainkan peran yang lebih penting daripada identitas sosial.

Pendahuluan

Kawasan Pasifik terdiri atas kepulauan-kepulauan yang tersebar di Samudera Pasifik bagian tengah dan selatan. Kawasan Pasifik Selatan kemudian dibagi menjadi tiga sub-kawasan, yaitu Melanesia, Polinesia, dan Mikronesia. Dari ketiga wilayah geografis tersebut, Melanesia merupakan salah satu wilayah yang memiliki organisasi regional, yaitu *Melanesian Spearhead Group* (MSG). MSG didirikan pada tahun 1988, dimana waktu itu negara-negara Melanesia yang baru merdeka berkumpul dalam semangat solidaritas etnis dan budaya dengan komitmen yang jelas dalam bekerja untuk memastikan pembebasan saudara Kanaky mereka.¹ Solidaritas ini berusaha untuk membuat bangsa Melanesia terlepas dari penjajahan sehingga memiliki kebebasan serta identitas sendiri. Nilai-nilai solidaritas kemudian seringkali dirujuk dengan menggunakan istilah *Melanesian Way*.

Melanesian Way merupakan istilah yang dipopulerkan oleh Bernard Narokobi, ahli hukum, filsuf, dan penyair yang paling dikenang karena menjadikan ‘*Melanesian Way*’ sebagai tema dalam wacana kemerdekaan di Papua Nugini (PNG).² *Melanesian Way* adalah tentang menyelesaikan suatu masalah dengan perdamaian, tanpa kekerasan, berkumpul untuk membahas permasalahan dari kedua sisi yang kemudian dapat menciptakan kepercayaan satu sama lain. Narokobi memiliki tujuan untuk melibatkan orang Melanesia, dari akar rumput hingga elit, dalam pembentukan kesadaran identitas,

budaya dan kebangsaan mereka sendiri. Kesadaran ini berusaha membangkitkan Melanesia yang telah lama dijajah Eropa sekaligus mendukung pembentukan negara-negara baru di kawasan Melanesia.

Meskipun berangkat dari PNG, namun *Melanesian Way* juga menyebar hingga ke Vanuatu, negara kepulauan yang sebagian wilayahnya merupakan bekas jajahan Inggris sementara sebagian lainnya oleh Perancis. Ralph E Oremdas mengatakan bahwa pengaruh nilai-nilai *Melanesian Way* sebagai bagian dari semangat anti kolonialisme tersebut dibawa oleh beberapa mahasiswa Vanuatu (yang kemudian menjadi anggota eksekutif Vanuaaku Pati) saat berkuliah di Universitas Papua Nugini. Ideologi nasionalis *Melanesian Way* juga mempengaruhi perdana menteri pertama Vanuatu, Walter Hadye Lini. Dia melihat perlu adanya kebangkitan budaya yang kemudian ia sebut dengan "*Melanesian Renaissance*". *Melanesian Renaissance* mengacu pada "kelahiran kembali identitas dan tujuan kita, dan untuk melestarikan tanpa hambatan hak yang diberikan Tuhan untuk berkembang dengan cara kita sendiri dan sesuai dengan nilai dan harapan kami sendiri."³ Nilai-nilai dalam *Melanesian way* dan *Melanesian renaissance* ini yang kemudian mempengaruhi sikap Vanuatu dalam menentang pengaruh asing mendukung sikap anti kolonial.

Selain itu, *Melanesia Renaissance* yang mengangkat isu dekolonisasi juga menjadi fokus utama Vanuatu dalam mengupayakan kemerdekaan terhadap wilayah Melanesia yang belum merdeka.⁴ Perdana Menteri

1The Interpreter. "The Melanesian Spearhead Group: What is it, and what does it do?" *The Lowy Institute*. Maret 14, 2014. <https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/melanesian-spearhead-group-what-it-and-what-does-it-do>

2 Bernard Narokobi. *The Melanesian Way*. (Port Moresby: Institute of Papua New Guinea Studies, 1980)

3 Ralph E Premdas, "Melanesia Socialism: Vanuatu's Quest for Self-definition and Problems of Implementation" *Pacific Studies*, Vol. 11, No. 1 (1987): 109

4 Thomas Temaluru. "Kepentingan Vanuatu dalam Usaha Pemerdekaan Papua", *Jurnal Analisis Hubungan Internasional* 05, No. 02 (Juni 2016), <http://repository.unair.ac.id/41370/>

Vanuatu, Joe Natuman, mengatakan bahwa Vanuatu berkomitmen untuk membantu dua wilayah Melanesia yang terjajah untuk mendapatkan kemerdekaan mereka.⁵ Dua wilayah tersebut adalah Papua dan Kaledonia Baru.

Papua merupakan wilayah Indonesia bagian Timur yang penduduknya berasal dari sub-ras Melanesia sama halnya seperti Vanuatu. Isu separatisme Papua merupakan isu yang sudah berlangsung selama bertahun-tahun dengan pasang surut yang tiada henti. Masyarakat Papua merasa berbeda dengan kebanyakan masyarakat Indonesia dan diperlakukan secara tidak adil. Inisiasi kemerdekaan Papua muncul dari manifestasi politik Komite Nasional yang mendesak Belanda pada 19 Oktober 1961 di Hollandia.⁶ Komite Nasional menyatakan, tanah yang mereka merdekakan bernama Papua, bangsa yang menghuninya ialah bangsa Papua, bendera nasional mereka ialah Bintang Kejora. Masyarakat Papua merasa mereka bukan bagian dari NKRI.⁷

Isu kemerdekaan Papua telah menjadi salah satu isu yang menarik perhatian negara-negara Melanesia. Hal ini terlihat ketika isu kemerdekaan Papua menjadi *main issue* atau isu utama dalam berbagai pertemuan MSG.⁸ Vanuatu, merupakan salah

satu negara Melanesia yang sangat gencar dalam mendukung kemerdekaan Papua. Dukungan Vanuatu terhadap pembebasan Papua dapat dilihat ketika Vanuatu berupaya untuk mendorong negara-negara Pasifik Selatan lainnya untuk ikut serta dalam mendukung atas kemerdekaan Papua. Konsistensi Vanuatu dapat dilihat dari seringnya Vanuatu menyuarakan permasalahan Papua baik di forum regional maupun internasional.⁹ Salah satu upaya diplomatik yang dilakukan Vanuatu terkait kemerdekaan Papua adalah ketika pada tanggal 4 Maret 2014, Perdana Menteri Vanuatu, Moana Carcasses Katokai Kalosil, di hadapan Sidang Tingkat Tinggi HAM PBB ke-25 mendesak komunitas internasional untuk mendukung kemerdekaan rakyat Papua.¹⁰ Kemudian pada sidang rutin Dewan HAM PBB ke-34 pada tahun 2017 lalu, Vanuatu dan enam negara lainnya juga menyatakan kekhawatiran terhadap dugaan marginalisasi dan kejahatan kemanusiaan yang terjadi di Papua.¹¹ Selain mengungkapkan dukungan terhadap kemerdekaan Papua dalam forum internasional, parlemen Vanuatu juga mengeluarkan kebijakan yaitu mengesahkan Undang-undang Wantok Blong Yumi pada Juni 2010 dimana tujuan dari undang-undang ini adalah untuk menyatakan pengakuan Vanuatu atas kemerdekaan Papua dari Indonesia dan juga bertujuan untuk menunjukkan komitmen Vanuatu untuk memperoleh status observer bagi Papua di *Melanesian Spearhead Group* (MSG) dan *Pacific Islands Forum* (PIF).

⁵ Radio New Zealand. "Vanuatu Reaffirms Melanesian Ecolonisation Stance". *Radio New Zealand*. Januari 27, 2015. <https://www.rnz.co.nz/international/pacific-news/264631/vanuatu-reaffirms-melanesian-decolonisation-stance>

⁶ Dieqy Hasbi Widhana. "Bagaimana Bangsa Papua Memproklamasikan & Membela Kemerdekaannya?". *Tirto*. Desember 01, 2019. <https://tirto.id/bagaimana-bangsa-papua-memproklamasikan-membela-kemerdekaannya-emy3>

⁷ Oktovianus Pogau. "Kenapa Rakyat Papua Tuntut Referendum". *Suara Papua*. Agustus 05, 2019. <https://suarapapua.com/2019/08/05/kenapa-rakyat-papua-tuntut-referendum/>

⁸ Bimbi Rianda, dkk. "Kebijakan Luar Negeri Indonesia Terhadap Dukungan Republik Vanuatu

Atas Kemerdekaan Papua Barat Tahun 2015-2016". *Dinamika Global*. 02, No. 01 (2017)

⁹ Thomas Temaluru. 2016

¹⁰ Bimbi Rianda, 2017

¹¹ Virginia Maulita Putri. "Vanuatu, Negara yang Mendukung Gerakan Separatis di Papua" *Detik News*. September 30, 2019 <https://news.detik.com/berita/d-4728070/vanuatu-negara-yang-mendukung-gerakan-separatis-di-Papua>

Beberapa studi terdahulu yang dilakukan oleh akademisi Indonesia terkait isu ini banyak berbicara tentang kepentingan nasional baik Vanuatu maupun Indonesia. Kusuma, misalnya, berangkat dari melihat keaktifan Vanuatu memberikan dukungan terhadap Papua dalam beberapa forum dewan PBB dengan menggunakan isu pelanggaran Hak Asasi Manusia, dia mempertanyakan kepentingan Vanuatu.¹² Dalam tulisannya, Kusuma menyimpulkan bahwa dukungan Vanuatu dilandasi oleh adanya kesamaan ras, keinginan untuk menjadi pemimpin di kawasan serta orientasi politik baik domestik maupun luar negeri. Sedangkan tulisan Helmy lebih berfokus pada pembangunan argumen bahwa Vanuatu adalah ancaman bagi Indonesia karena secara konsisten mendukung kemerdekaan Papua.¹³ Karena itu dia mengajukan beberapa langkah yang bisa dilakukan Indonesia untuk membela kepentingan nasionalnya termasuk memberikan sanksi diplomatik tegas terhadap negara tersebut. Temaluru di dalam tulisannya juga menganalisis kepentingan nasional Vanuatu namun dia melihat dari dinamika politik dalam negeri termasuk ideologi yang dianut.¹⁴

Identitas sebagai pengkonstruksi kepentingan nasional masih belum banyak digunakan dalam pengkajian kebijakan sebuah negara. Pendekatan konstruktivisme holistik digunakan dalam penelitian ini untuk mendapatkan gambaran mengenai bagaimana struktur normatif dan ideasional dapat mempengaruhi sebuah perilaku negara. Tulisan ini akan berusaha menjawab pertanyaan tentang bagaimana sikap Vanuatu

yang mendukung kemerdekaan Papua pada tahun 2010-2019 dalam tinjauan konstruktivisme holistik.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini metode yang digunakan penulis adalah kualitatif yang mengacu secara luas pada pengumpulan data dan strategi analisis yang mengandalkan pengumpulan dan analisis data non-numerik.¹⁵ Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian eksplanasi. Penelitian eksplanasi biasanya memiliki tujuan utama untuk menjelaskan mengapa peristiwa terjadi dan untuk membangun, menguraikan, memperluas, atau menguji teori.¹⁶ Penelitian yang menggunakan metode kualitatif ini difokuskan untuk mencari data dan tulisan yang menjelaskan mengenai sikap Vanuatu dalam mendukung kemerdekaan Papua. Penulis di sini akan berfokus pada latar belakang sejarah, sosial, budaya, dan politik Vanuatu serta kebijakan-kebijakan Vanuatu yang berhubungan dengan kemerdekaan Papua baik dalam ruang lingkup domestik maupun internasional. Penelitian ini dibatasi dengan jangka waktu dari tahun 2010 dimana dimulai sejak Vanuatu membentuk Undang-Undang Wantok Blong Yumi hingga tahun 2019. Data dalam penelitian ini berupa teks tertulis seperti artikel berita, jurnal, buku dan lain sebagainya yang penulis dapatkan baik dalam bentuk secara fisik maupun *online*, kemudian data tersebut dianalisis secara kualitatif dengan melalui proses mengulas, menyintesis dan menginterpretasi data untuk

¹² Pratama Dinul Kusuma, Analisis Dukungan Vanuatu Terhadap Upaya Kemerdekaan Papua, Jurnal Pena Wimaya Vol 2, No 1 (2022),

<https://doi.org/10.31315/jpw.v2i1.4967>

¹³ Berlian Helmy, Mematahkan Dukungan Vanuatu Terhadap Gerakan ULMWP (United Liberalization Movement for Papua) Guna Menegakkan Kedaulatan NKRI, Jurnal Kajian LEMHANNAS RI, Vol. 38, Juni 2019

¹⁴ Thomas Temaluru. 2016

¹⁵ Lamont, Christopher. *Research Methods in International Relations*. Great Britain: SAGE Publications, 2015.

¹⁶ Neuman, W. Laurance. *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*. 7th Ed. Edinburgh: Pearson Education Limited, 2014.

menggambarkan dan menjelaskan sebuah fenomena atau kondisi sosial yang diteliti.¹⁷

Konstruktivisme merupakan salah satu pendekatan dalam Hubungan Internasional dimana proposisi teoritis utamanya adalah baik objek maupun konsep tidak memiliki makna yang tetap atau objektif; sebaliknya, maknanya dibangun melalui interaksi sosial.¹⁸ Konstruktivisme muncul sebagai bentuk kritik terhadap teori-teori yang telah ada sebelumnya dimana sebagian besar asumsinya material. Konstruktivisme menekankan pada pentingnya dimensi sosial dalam hubungan internasional dengan mengacu pada faktor norma, nilai, aturan, identitas budaya, dan simbol linguistik sebagai penentu karakter hubungan internasional.¹⁹

Pada tahun 1990-an, terdapat tiga jenis konstruktivisme yang berbeda, yang pertama yaitu konstruktivis sistemik dimana ia berfokus pada interaksi antara aktor Negara (*state as unitary actor*). Segala sesuatu yang ada atau terjadi dalam ranah politik domestik diabaikan, dan uraian tentang politik dunia diturunkan hanya dengan berteori bagaimana negara-negara berhubungan satu sama lain di ranah eksternal. Salah satu tokoh dari konstruktivis sistemik adalah Alexander Wendt. Kedua yaitu konstruktivis level unit yang berkonsentrasi pada hubungan antara norma-norma sosial dan hukum domestik serta identitas dan kepentingan Negara. Konstruktivisme ini memiliki keutamaan untuk memungkinkan penjelasan variasi identitas, minat dan tindakan lintas negara,

sesuatu yang dikaburkan oleh konstruktivisme sistemik. Meskipun demikian, bentuk konstruktivisme ini mengalami kesulitan menjelaskan kesamaan antar negara, untuk pola konvergensi dalam identitas dan kepentingan negara. Terakhir yaitu konstruktivisme holistik yang merupakan gabungan dari konstruktivis sistemik dan level unit. Jika konstruktivis sistemik dan level unit mereproduksi dikotomi tradisional antara internasional dan domestik, konstruktivis holistik berusaha menjembatani kedua domain tersebut. Konstruktivis holistik memfokuskan pada bagaimana fenomena sosial domestik dan internasional berinteraksi untuk membentuk perilaku negara dalam hubungan internasional.²⁰ Penelitian ini menggunakan konstruktivis holistik dengan pertimbangan bahwa identitas Vanuatu yang melatarbelakangi dukungannya untuk kemerdekaan Papua adalah bentuk dari interaksi dialektik antara identitas yang terkonstruksi secara domestik dengan identitas sosialnya yang hadir dari interaksinya dengan negara-negara lain.

Dari perspektif konstruktivis holistik, perilaku politik luar negeri merupakan konsekuensi dari interaksi baik antara *corporate identity* (level domestik) dan identitas sosial (level internasional). Identitas sosial di sini mengacu pada "*the meaning an actor attributes to itself while taking the perspective of others*," sedangkan *corporate identity* mengacu pada "*internal human, material, ideological, or cultural characteristics that make a state what it is*"²¹

¹⁷ Yusuf, A. Muri. *Metode Penelitian; Kuantitatif, kualitatif & Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana, 2017.

¹⁸ Karen A. Mingst dan Ivan M. Arreguin-Toft. *Essentials of International Relations*, 7th Ed. Canada: W. W. Norton & Company, Inc., 2017. Hlm 92

¹⁹ Bob Sugeng Hadiwinata, *Studi dan Teori Hubungan Internasional: Arus Utama, Alternatif, dan reflektif*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017. Hlm 268

²⁰ Mahdi Mohammad Nia. "A Holistic Constructivist Approach to Iran's Foreign Policy". *International Journal of Business and Social Science*. Vol. 2 No.4 (2011): 282

²¹ Wendt, Alexander. "Collective Identity Formation and the international state" dalam Nia, Mahdi Mohammad. "A Holistic Constructivist Approach to Iran's Foreign Policy". *International Journal of Business and Social Science*. Vol. 2 No.4 (2011) : 282



Menurut konstruktivis Holistik, pembentukan identitas di tingkat internal dan internasional adalah proses berkelanjutan di mana *corporate identity* dan *social identity* berinteraksi satu sama lain dan dengan ini negara menghasilkan dan mereproduksi definisi baru dari 'self' dan 'others'.²² Menurut pendekatan ini, setiap transformasi dari *corporate identity* suatu negara - sebagai akibat dari kondisi domestik - pada akhirnya akan mempengaruhi pembentukan identitas di tingkat internasional di mana negara akan berusaha menata ulang prioritasnya sesuai dengan identitas yang baru.

Hasil dan Diskusi

Pengalaman dan trauma masyarakat di masa lampau cenderung memberikan pengaruh pada identitas suatu negara dan kebijakan luar negerinya dalam jangka panjang.²³ Seperti negara-negara lain di dunia, Vanuatu juga melewati berbagai peristiwa yang membuat dirinya seperti sekarang. Peristiwa-peristiwa yang dialami oleh Vanuatu memiliki andil yang cukup besar dalam mempengaruhi identitas Vanuatu saat ini. Pada masa tahun 1800-an, Vanuatu mengalami masa-masa yang suram, banyak terjadi eksploitasi yang dilakukan oleh negara Barat terhadap penduduk Vanuatu. Ratusan penduduk Vanuatu telah diintimidasi, dibunuh atau diculik untuk menjadi budak di perkebunan yang ada di Australia.²⁴ Selain itu, negara Barat juga

telah menipu penduduk Vanuatu untuk menjual tanahnya ke mereka untuk kepentingan bisnis asing. Pada tahun 1971, diperkirakan 36% dari New Hebrides dikuasai oleh misionaris asing, penanam (*planters*) dan pedagang.²⁵ Bahkan dalam periode sekitar kemerdekaan banyak terjadi kekerasan dimana para pemukim Prancis dan elemen lainnya berusaha untuk menggagalkan naiknya Vanuatu Pati yang dipimpin oleh Walter Lini.²⁶ Sebagai negara yang pernah dijajah oleh dua negara sekaligus menyebabkan banyak penduduk Vanuatu yang merasa kebingungan. Pemerintah Inggris-Prancis yang didirikan di bawah Protokol menciptakan perpecahan yang meliputi sebagian besar aspek kehidupan ni-Vanuatu. Dalam interaksi sehari-hari, para administrator Prancis dan Inggris serta warga, bisnis, dan gereja mereka masing-masing terlibat dalam persaingan yang ketat untuk mendapatkan loyalitas ni-Vanuatu. Meskipun pada satu tingkat hal ini memberikan peluang bagi beberapa ni-Vanuatu, tetapi secara keseluruhan dampaknya sangat menghancurkan. Bahkan Walter Lini dalam otobiografinya kemudian menyebut pengaturan kondominium sebagai "pandemonium" (keadaan kebingungan dan kekacauan).²⁷

Pengalaman pahit yang dialami oleh Vanuatu selama masa penjajahan secara tidak langsung membuat Vanuatu menolak pengaruh asing dan membenci segala bentuk penindasan yang dilakukan oleh kelompok-

<https://www.rnz.co.nz/collections/u/new-flags-flying/nff-vanuatu/about-vanuatu>

²⁵ The Daily Post Vanuatu. "Minsiter Regenvanu Addresses Non-Aligned Movement Ministerial Meeting" The Daily Post Vanuatu. April 7, 2018. https://dailypost.vu/news/minister-regenvanu-addresses-non--aligned-movement-ministerial-meeting/article_03b33fdc-c018-50c7-93bb-d7f582fd350b.html

²⁶ Premdas, Ralph. dan Michael C. Howard, 1987

²⁷ Daily Post Vanuatu. 2018

²² Nia, Mahdi Mohammad, 2011

²³ Enes Bayrakli, "Turkish Foreign Policy in Transition: The Emergence of Kantian Culture in Turkish Foreign Policy (A Holistic Constructivism Approach)" (2012)

²⁴ Radio New Zealand. "Vanuatu: A Brief History" *Radio New Zealand*.

kelompok yang memiliki power terhadap kelompok yang lebih rentan. Rasa traumatis yang dirasakan oleh Vanuatu pada akhirnya membentuk identitas Vanuatu sebagai negara yang memiliki prinsip anti kolonialisme. Identitas Vanuatu yang bersikap anti kolonialisme membuat Vanuatu mendukung prinsip penentuan nasib sendiri atau *self determination* bagi negara atau kelompok yang tertindas untuk dapat memperoleh kemerdekaan mereka. Sejak merdeka, Vanuatu tidak pernah berhenti mendukung kelompok-kelompok yang tertindas untuk mendapatkan haknya. Dukungan Vanuatu kepada kelompok-kelompok yang tertindas sering digaungkan oleh Vanuatu dalam forum multilateral baik regional maupun internasional. Isu mengenai dekolonisasi telah menjadi agenda utama Vanuatu selama beberapa tahun kebelakang. Hal ini dapat dilihat ketika Vanuatu yang tidak pernah absen membawa isu dekolonisasi ke dalam forum-forum internasional setiap tahunnya, sebagaimana yang diucapkan oleh perdana menteri Vanuatu, Moana Jacques Kalosil Carcasses saat pertemuan UNGA ke-68 tahun 2013. Dukungan Vanuatu terhadap upaya dekolonisasi dapat dilihat ketika secara terus menerus mendukung kemerdekaan Papua di forum-forum internasional.

Selain sejarah kolonialisme dan anti kolonialisme, *corporate identity* juga terbangun melalui kondisi sosial sebuah negara. Narakobi, untuk membangkitkan kesadaran identitas Melanesia, berusaha mengkritisi pemikiran masyarakat Melanesia yang lebih condong pada pemikiran Barat. Narakobi mengatakan bahwa pemikiran masyarakat Melanesia yang menganggap bahwa untuk menjadi maju maka harus meninggalkan budaya leluhur dan mengadopsi sistem atau cara Barat membuat masyarakat Melanesia menyangkal sebagian

besar identitas mereka.²⁸ Dia menambahkan bahwa orang-orang Melanesia berhak berkewajiban menjadikan nilai-nilai leluhur sebagai pedoman dalam membebaskan diri dari keadaan yang menindas. Dalam bukunya, Narakobi mengatakan bahwa “*our Melanesian ways stem from the unquestionable fact that we are an ancient people, born to liberty, born to ancient culture and civilization.*” Nilai-nilai yang terkandung dalam *Melanesian Way* kemudian mempengaruhi orang-orang Melanesia dalam mempromosikan kebaikan seperti yang mereka lihat tanpa rasa takut. Selain itu, salah satu elemen yang paling penting dari masyarakat Melanesia adalah hubungan antar manusia yang erat serta kerjasama dan saling mendukung, terutama pada saat dibutuhkan. Mereka saling menganggap sesama Melanesia adalah saudara mereka. Mereka tidak akan menolak jika saudara mereka membutuhkan pertolongan. Mereka akan dengan tulus membantu saudara mereka jika saudara mereka sedang dalam keadaan krisis. Pembahasan Narakobi mengenai isu fundamental identitas, perubahan budaya, dan hubungan regional di Melanesia yang awalnya hanya ditujukan kepada masyarakat Papua Nugini ternyata berimplikasi pada wilayah yang lebih luas. Semangat kebangkitan identitas Melanesia ini pada akhirnya mempengaruhi negara-negara Melanesia lainnya untuk turut bangkit dari nilai-nilai Barat dan kembali pada nilai-nilai leluhur mereka, termasuk nilai kebebasan dan persaudaraan antar masyarakat Melanesia. Nilai ini yang kemudian menjelma dalam bentuk dukungan negara tersebut terhadap kemerdekaan Papua.

Budaya atau tradisi yang berasal dari leluhur tersebut kemudian diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai yang dapat kita jumpai hampir di semua wilayah

²⁸ Lise M. Dobrin dan Alex Golub. “The Legacy of Bernard Narakobi and The Melanesian Way.” *The Journal of Pacific History*. Vol.55 No.2 (2020)

Melanesia tersebut adalah *kastom* dan *wantok*. Forsyth menjelaskan bahwa *kastom* dapat dibagi menjadi dua kategori besar, kategori pertama menggambarkan *kastom* sebagai “*certain distinctive features of a way of life*.” dan kategori kedua melihat *kastom* sebagai “*whole way of life*”.²⁹ Bolton kemudian berpendapat bahwa sifat *kastom* itu fleksibel dan menyatakan “kategori pengetahuan dan praktik” yang isinya tetap “sebagian besar tidak ditentukan.”³⁰ Untuk mempertahankan *kastom*, para pemimpin atau *chiefs* memiliki peran yang sangat penting dalam melestarikan dan mengembangkan *kastom*, dengan adanya peran tersebut memperlihatkan bahwa para pemimpin dihormati dan dijunjung tinggi sebagai pemimpin tradisional ni-Vanuatu. Sistem *wantok*, menurut definisi Renzio, diterjemahkan sebagai “... hubungan (atau sekumpulan kewajiban) antara individu yang dicirikan oleh beberapa atau semua hal berikut: (a) bahasa yang sama, (b) kekerabatan kelompok yang sama, (c) wilayah geografis yang sama, (d) asosiasi sosial atau kelompok agama yang sama, dan (e) kepercayaan dalam prinsip timbal balik yang sama.”³¹ Sistem *wantok*, oleh karena itu, menandakan sebuah pengaturan yang menuntut jaringan kerja sama, kepedulian dan dukungan timbal balik, dan keterikatan bersama pada *kastom* dan lokalitas. Budaya yang telah mengakar kuat di Vanuatu kemudian menciptakan sebuah identitas tersendiri bagi masyarakat Vanuatu. Seperti yang dikatakan oleh pencipta ideologi *Melanesian Way*, bahwa Melanesia bukanlah

orang-orang Asia, Eropa, Afrika ataupun Polinesia, tetapi mereka adalah bangsa Melanesia yang memiliki kebebasan dalam menentukan nasib mereka sendiri. *Kastom* dan *Wantok* yang berakar pada tradisi dan kekeluargaan di Vanuatu mendorong negara tersebut untuk melihat negara-negara Melanesia lain sebagai bagian dari keluarga yang harus peduli satu sama lain dan terikat dalam ikatan budaya yang sama. Semangat kekeluargaan dan kekerabatan ini yang kemudian membangun klasifikasi tentang siapa yang merupakan anggota keluarga dan siapa yang bukan. Papua dalam konteks ini, karena memiliki persamaan baik dalam *kastom* maupun *wantok*, dianggap sebagai keluarga yang harus dipedulikan dan diperjuangkan nasibnya.

Social Identity Vanuatu

Dalam konstruktivisme holistik, identitas suatu negara tidak hanya dibentuk pada level domestik saja, tetapi juga terbentuk di level internasional (sistemik). Identitas suatu negara dapat terbentuk melalui interaksi antar aktor yang ada di sistem internasional. Negara dalam sistem internasional kemudian akan berinteraksi satu sama lain melalui berbagai cara, salah satunya adalah bergabungnya negara di organisasi internasional. Bergabungnya suatu negara dalam sebuah kelompok sosial yang dalam hal ini adalah organisasi internasional tentunya akan mempengaruhi dan membentuk identitas dari negara tersebut.

Identitas Vanuatu dapat dilihat ketika Vanuatu bergabung dengan beberapa organisasi internasional. Misalnya Vanuatu merupakan anggota dari organisasi internasional PBB, organisasi regional PIF, dan organisasi sub-regional yaitu MSG. PBB sendiri merupakan organisasi internasional yang bertujuan untuk menciptakan perdamaian dan keamanan dunia dengan anggotanya adalah negara-negara berdaulat. Kemudian PIF merupakan organisasi regional yang bertujuan untuk meningkatkan kerja sama kawasan dimana anggota dari organisasi tersebut merupakan negara-negara

²⁹ Miranda Forsyth, *A Bird that Flies with Two Wings: the Kastom and State Justice Systems in Vanuatu*, ANU E Press, Canberra, 2009

³⁰ Lissant Bolton, Chief Willie Bongmatur Maldo and the Role of Chiefs in Vanuatu, *The Journal of Pacific History* Volume 33, 1998 - Issue 2

³¹ Gordon Leua Nanau, “The Wantok System as A Socio-economic and Political Network in Melanesia,” *The Journal of Multicultural Society*, Vol. 2, No. 1, (2011) hlm 31-55

yang ada di kawasan Pasifik. Sedangkan MSG merupakan organisasi subregional yang berfokus pada kerja sama dalam bidang sosial budaya, ekonomi, dan politik. Bergabungnya Vanuatu di tiga organisasi tersebut kemudian dapat menjelaskan identitas Vanuatu sebagai negara Melanesia yang berdaulat yang terletak di kawasan Pasifik. Melalui organisasi tersebut, Vanuatu juga turut mempromosikan nilai-nilai perdamaian dan menciptakan hubungan kerja sama dengan negara lainnya.

Selain bergabung dalam organisasi internasional, pembentukan identitas Vanuatu juga dapat dipengaruhi oleh norma internasional yang berlaku. Konstruktivisme menekankan pada kekuatan ide dan norma dalam menciptakan identitas dan kepentingan suatu negara. Dalam kasus ini, sikap Vanuatu dalam mendukung Papua juga dipengaruhi oleh norma internasional, yaitu norma HAM. Hal ini sejalan dengan apa yang diucapkan oleh Perdana Menteri Vanuatu saat pertemuan UNGA tahun 2019 yang mengutuk keras pelanggaran HAM terhadap penduduk asli Papua dengan mengingatkan kembali akan prinsip-prinsip yang tertulis dalam Piagam PBB.³²

Komitmen Vanuatu mengenai HAM inilah yang kemudian membuatnya sering mengangkat isu-isu pelanggaran di Papua pada forum internasional. Tidak hanya berfokus pada isu Papua saja, tetapi dukungan Vanuatu terhadap HAM juga ditujukan kepada negara lain, misalnya adalah Palestina, Syria, dan Kaledonia Baru. Vanuatu selalu mengecam negara-negara besar yang berusaha untuk mengeksploitasi, mendiskriminasi, dan bertindak semena-mena terhadap negara yang lemah. Norma HAM internasional secara tidak langsung membentuk identitas Vanuatu sebagai negara yang menghormati, mendukung, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia bagi

³² United Nations. "Vanuatu Statement on United Nations General Assembly." <https://ask.un.org/faq/92104>

tiap-tiap individu, tidak peduli apapun bangsa, ras, dan agama mereka.

Sikap Vanuatu dalam mendukung kemerdekaan Papua juga dipengaruhi oleh respon atau kebijakan dari aktor internasional lain terhadap isu Papua, misal kebijakan Indonesia yang memutuskan untuk mengajukan aplikasi keanggotaan MSG tahun 2010. Meskipun ditentang keras oleh Vanuatu, Indonesia memenangkan status pengamat (*observer*) pada tahun 2011 dengan bantuan Perdana Menteri Fiji Frank Bainimarama, yang saat itu menjadi Ketua KTT MSG, dan dukungan dari Sir Michael Somare, yang saat itu menjadi Perdana Menteri PNG.³³ Keanggotaan Indonesia sebagai *observer* di MSG, telah berhasil mengasingkan Vanuatu dan memperdalam persepsi bahwa partisipasi Indonesia telah membahayakan peluang perwakilan Papua. Setelah Indonesia berhasil menjadi *observer* di MSG, perwakilan Papua juga turut mengajukan aplikasi keanggotaan MSG pada tahun 2013. Namun, sebelum pemungutan suara diberikan pada aplikasi Papua, menteri luar negeri Indonesia menyarankan agar MSG melakukan kunjungan pencarian fakta ke Papua untuk menyelidiki masalah hak asasi manusia, tetapi Vanuatu telah memboikot kunjungan tersebut dan menolak pernyataan yang dikeluarkan pada Januari 2014 oleh para menteri luar negeri MSG. Saat itu, Menteri Luar Negeri Vanuatu Edward Natapei telah menarik diri dari kunjungan karena pemerintahnya percaya program yang dijadwalkan menunjukkan bahwa misi tersebut sangat tidak mungkin untuk mencapai apa yang diinginkan oleh para pemimpin MSG.³⁴

³³ The Interpreter. "Papua: Melanesian Spearhead Group has A Tough Decision to Make" *Lowy Institute*. April 3, 2015. <https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/west-papua-melanesian-spearhead-group-has-tough-decision-make>

³⁴ Radio New Zealand. "Vanuatu Withdraws from MSG Mission to Indonesia, Papua" *Radio New*

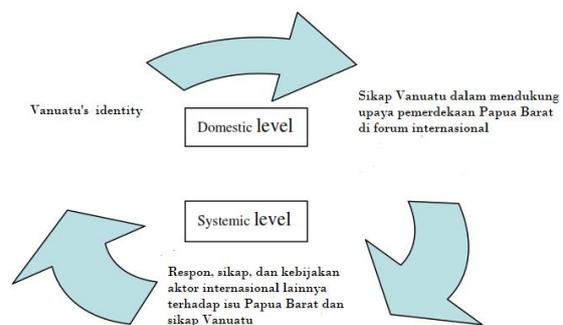
Selain itu, dalam menanggapi keberhasilan Indonesia menjadi *observer* di MSG dan kemudian menjadi *associate member* di tahun 2015, Vanuatu semakin gencar mendukung keanggotaan Papua di MSG. Misalnya pada tahun 2016, Perdana Menteri Vanuatu Hon. Charlot Salwai dan pemerintahnya mengumumkan bahwa mereka akan mendukung ULMWP untuk memperoleh keanggotaan penuh MSG, sambil menyerukan pencabutan status “*associate member*” Indonesia di MSG.³⁵ Sikap Indonesia yang memutuskan untuk mengajukan keanggotaan di MSG baik sebagai *observer* pada tahun 2011 dan sebagai *associate member* pada tahun 2015 telah memperkuat sikap agresivitas Vanuatu dalam mendukung Papua.

Interaksi Corporate Identity dan Social Identity Vanuatu

Konstruktivisme tidak memperlakukan identitas dan kepentingan negara sebagai variabel yang sudah ditentukan sebelumnya dan tetap; sebaliknya, mengklaim bahwa identitas (persepsi diri) suatu negara adalah sumber utama dalam pembentukan kepentingan negara tersebut. Sebagaimana yang dikatakan oleh Alexander Wendt bahwa identitas adalah dasar dari kepentingan, maka identitas aktor yang dikondisikan oleh struktur non-material sangat lah penting. Identitas lah yang membentuk kepentingan, baru kemudian terwujud dalam perilaku. Identitas Vanuatu yang terbentuk baik di level domestik maupun sistemik kemudian mempengaruhi

Vanuatu dalam menentukan kepentingannya. Identitas Vanuatu yang telah dijelaskan sebelumnya memberikan pengaruh pada prioritas Vanuatu dalam mendukung upaya kemerdekaan Papua. Vanuatu kemudian menjadikan isu Papua sebagai kepentingan nasionalnya.

Konstruktivisme holistik memberikan penjelasan yang cukup jelas dalam menggambarkan bagaimana identitas Vanuatu yang terbentuk di level domestik dan level sistemik kemudian dapat mempengaruhi sikapnya dalam mendukung Papua. Pendekatan ini memperkenalkan model “*self-reinforcing cycle of norm-driven behavior*” yang akan menjelaskan bagaimana *corporate identity* dan *social identity* Vanuatu saling berinteraksi satu sama lain.



Self-reinforcing cycle of norm-driven behavior

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa identitas Vanuatu terkonstruksi pada level domestik sehingga dapat dikatakan bahwa identitas Vanuatu cenderung bersifat endogen daripada eksogen. Hal ini menunjukkan sikap Vanuatu dalam mendukung Papua lebih didasari oleh *corporate identity* mereka daripada *social identity*. Identitas yang telah terkonstruksi di level domestik kemudian dibawa oleh Vanuatu ke level sistemik dimana pada level ini identitas Vanuatu memproduksi istilah berupa *self* dan *others*.

Pada level sistemik, Vanuatu membawa *corporate identity*-nya dan berinteraksi dengan aktor internasional lainnya. Di level

Zealand. Januari 11, 2014. <https://www.rnz.co.nz/international/pacific-news/233111/vanuatu-withdraws-from-msg-mission-to-indonesia,-west-papua>

³⁵ Free Papua Campaign. “Massive Rally in Vanuatu Calling for Papua’s Full MSG Membership.” Freewestpapua.org. April 29, 2016. <https://www.freewestpapua.org/2016/04/29/massive-rally-in-vanuatu-calling-for-west-papuas-full-msg-membership/>

ini, identitas Vanuatu dapat menguat sebagai akibat dari respon aktor internasional terhadap dirinya. Misalnya, identitas Vanuatu yang terkonstruksi di level domestik (yang dipengaruhi oleh sejarah, sosial budaya, dan politik domestik) kemudian mempengaruhi sikap agresif Vanuatu dalam mendukung upaya kemerdekaan Papua di forum internasional. Sikap yang ditunjukkan oleh Vanuatu di sistem internasional ini kemudian mendapat respon dari aktor internasional, seperti Indonesia dan PBB, yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Vanuatu.

Selama ini Vanuatu selalu mendesak Indonesia dan PBB untuk memberikan perhatian lebih dan memberikan solusi terhadap isu Papua. Sikap Indonesia yang melawan balik Vanuatu di sidang umum PBB, kebijakan Indonesia dalam mengajukan keanggotaan MSG, dan pelanggaran HAM di Papua yang kian memburuk membuat Vanuatu geram dengan tindakan Indonesia. Pada "level sistemik", dapat dikatakan bahwa norma-norma konfrontatif dapat mengarahkan negara-negara untuk mengadopsi pendekatan yang lebih agresif terhadap satu sama lain dan norma-norma global yang ramah sebaliknya mengarahkan negara-negara untuk mengadopsi kebijakan yang lebih kooperatif. Respon aktor internasional pada level sistemik kemudian memicu Vanuatu dalam memperkuat identitasnya yang kemudian nantinya akan berpengaruh pada sikap Vanuatu yang lebih agresif dalam mendukung upaya kemerdekaan Papua di forum internasional.

Kesimpulan

Sikap Vanuatu yang mendukung kemerdekaan Papua secara konsisten dalam kurun waktu 2010-2019 dalam tinjauan konstruktivisme holistik merupakan bentuk penegasan dari identitas Vanuatu. Pembentukan identitas dari dalam (*corporate*

identity) dipengaruhi oleh sejarah Vanuatu sebagai negara bekas jajahan yang kemudian mengadopsi ideologi Melanesian Way untuk kembali ke nilai-nilai leluhur, termasuk nilai tentang tradisi, kekerabatan dan kebebasan. Faktor sejarah dan ideologi ini yang membuat Vanuatu menolak kolonialisme dalam bentuk apapun. Sementara *wantok* dan *kastom* yang dianut masyarakat Vanuatu menempatkan Papua di dalam lingkaran kerabat yang harus dipedulikan. Sedangkan identitas sosial yang terbentuk dari interaksinya dengan negara-negara lain pada dasarnya merupakan cerminan dari identitas *corporate* yang dimunculkan secara terus menerus sehingga melekat pada negara tersebut. Interaksi dua identitas ini kemudian berdialektika dan saling memperkuat satu sama lain sehingga terciptalah identitas Vanuatu sebagai negara yang secara konsisten memperjuangkan berakhirnya kolonialisme di Melanesia. Hal ini lah yang membuat Vanuatu menjadi memiliki kepentingan untuk terus memperjuangkan kemerdekaan Papua, salah satunya dengan terus menerus melakukan serangan secara diplomatik kepada Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Bayrakli, Enes. "Turkish Foreign Policy in Transition: The Emergence of Kantian Culture in Turkish Foreign Policy (A Holistic Constructivism Approach)" (2012)
- Berlian Helmy, Mematahkan Dukungan Vanuatu Terhadap Gerakan ULMWP (United Liberalization Movement for Papua) Guna Menegakkan Kedaulatan NKRI, *Jurnal Kajian LEMHANNAS RI*, Vol. 38, Juni 2019
- Bolton, Lissant, Chief Willie Bongmatur Maldo and the Role of Chiefs in Vanuatu, *The Journal of Pacific History* Volume 33, 1998 - Issue 2
- Dobrin, Lise M. dan Alex Golub. "The Legacy of Bernard Narokobi and The Melanesian Way." *The Journal of Pacific History*. Vol.55 No.2 (2020)
- Forsyth, Miranda, *A Bird that Flies with Two Wings: the Kastom and State Justice Systems in Vanuatu*, ANU E Press, Canberra, 2009
- Free Papua Campaign. "Massive Rally in Vanuatu Calling for Papua's Full MSG Membership." *Freewestpapua.org*. April 29, 2016. <https://www.freewestpapua.org/2016/04/29/massive-rally-in-vanuatu-calling-for-west-papuas-full-msg-membership/>
- Hadiwinata, Bob Sugeng. *Studi dan Teori Hubungan Internasional: Arus Utama, Alternatif, dan reflektivis*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor
- Lamont, Christopher. *Research Methods in International Relations*. Great Britain: SAGE Publications, 2015.
- Mingst, Karen A. dan Ivan M. Arreguin-Toft. *Essentials of International Relations*, 7th Ed. Canada: W. W. Norton & Company, Inc., 2017. Hlm 92
- Nanau, Gordon Leua. "The Wantok System as A Socio-economic and Political Network in Melanesia," *The Journal of Multicultural Society*, Vol. 2, No. 1, (2011) hlm 31-55
- Narokobi, Bernard . *The Melanesian Way*. (Port Moresby: Institute of Papua New Guinea Studies, 1980)
- Neuman, W. Laurance. *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*. 7th Ed. Edinburgh: Pearson Education Limited, 2014.
- Nia, Mahdi Mohammad. "A Holistic Constructivist Approach to Iran's Foreign Policy".

- International Journal of Business and Social Science. Vol. 2 No.4 (2011) : 282
- Pogau, Oktovianus. "Kenapa Rakyat Papua Tuntut Referendum". Suara Papua. Agustus 05, 2019. <https://suarapapua.com/2019/08/05/kenapa-rakyat-Papua-tuntut-referendum/>
- Pratama Dinul Kusuma, Analisis Dukungan Vanuatu Terhadap Upaya Kemerdekaan Papua, Jurnal Pena Wimaya, Vol 2, No 1 (2022), <https://doi.org/10.31315/jpw.v2i1.4967>
- Premdas, Ralph E. "Melanesia Socialism: Vanuatu's Quest for Self-definition and Problems of Implementation" Pacific Studies, Vol. 11, No. 1 (1987) : 109
- Putri, Virginia Maulita. "Vanuatu, Negara yang Mendukung Gerakan Separatis di Papua" Detik News. September 30, 2019 <https://news.detik.com/berita/d-4728070/vanuatu-negara-yang-mendukung-gerakan-separatis-di-Papua>
- Radio New Zealand. "Vanuatu Reaffirms Melanesian Ecolonisation Stance". Radio New Zealand. Januari 27, 2015. <https://www.rnz.co.nz/international/pacific-news/264631/vanuatu-reaffirms-melanesian-decolonisation-stance>
- Radio New Zealand. "Vanuatu Withdraws from MSG Mission to Indonesia, Papua" Radio New Zealand. Januari 11, 2014. <https://www.rnz.co.nz/international/pacific-news/233111/vanuatu-withdraws-from-msg-mission-to-indonesia,-west-papua>
- Radio New Zealand. "Vanuatu: A Brief History" Radio New Zealand. <https://www.rnz.co.nz/collections/u/new-flags-flying/nff-vanuatu/about-vanuatu>
- Rianda, Bimbi, dkk. "Kebijakan Luar Negeri Indonesia Terhadap Dukungan Republik Vanuatu Atas Kemerdekaan Papua Barat Tahun 2015-2016". Dinamika Global. 02, No. 01 (2017), 2017.
- The Daily Post Vanuatu. "Minsiter Regenvanu Addresses Non-Aligned Movement Ministerial Meeting" The Daily Post Vanuatu. April7, 2018. https://dailypost.vu/news/minister-regenvanu-addresses-non--aligned-movement-ministerial-meeting/article_03b33fdc-c018-50c7-93bb-d7f582fd350b.html
- The Interpreter. "The Melanesian Spearhead Group: What is it, and what does it do?" The Lowy Institute. Maret 14, 2014. <https://www.loyyinstitute.org/the-interpreter/melanesian-spearhead-group-what-it-and-what-does-it-do>
- The Interpreter. "Papua: Melanesian Spearhead Group has A Tough Decision to Make" Lowy Institute. April 3, 2015. <https://www.loyyinstitute.org/the-interpreter/west-papua-melanesian-spearhead-group-has-tough-decision-make>
- Thomas Temaluru. "Kepentingan Vanuatu dalam Usaha Pemerdaakaan Papua", Jurnal Analisis Hubungan Internasional 05, No. 02 (Juni 2016), <http://repository.unair.ac.id/41370/>
- United Nations. "Vanuatu Statement on United Nations General Assembly." <https://ask.un.org/faq/92104>
- Widhana, Dieqy Hasbi. "Bagaimana Bangsa Papua Memproklamasikan & Membela Kemerdekaannya?". Tirto. Desember 01, 2019. <https://tirto.id/bagaimana-bangsa-papua-memproklamasikan-membela-kemerdekaannya-emy3>
- Yusuf, A. Muri. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan. Jakarta: Kencana, 2017.